

Kepercayaan (*trust*) sebagai Modal Pembangunan

Relasi antara Layanan Publik, Korupsi, dan Investasi



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

26 March 2026

KEPERCAYAAN (TRUST) SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN: RELASI ANTARA LAYANAN PUBLIK, KORUPSI, DAN INVESTASI

Abstrak

Makalah ini membahas kepercayaan (*trust*) sebagai salah satu modal pembangunan yang paling menentukan, tetapi sering kurang diperhatikan dibanding modal fisik, modal finansial, dan modal manusia. Argumen utama makalah ini ialah bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, ketersediaan infrastruktur, atau derasnya arus investasi, melainkan juga pada kualitas relasi antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Ketika warga percaya bahwa institusi publik bekerja adil, transparan, responsif, dan bebas dari korupsi, kepatuhan sosial meningkat, biaya transaksi menurun, legitimasi kebijakan menguat, dan iklim investasi menjadi lebih sehat. Sebaliknya, ketika layanan publik buruk dan korupsi dibiarkan, maka trust menurun, kepatuhan pajak melemah, biaya ekonomi membesar, kualitas belanja publik turun, dan investor menilai risiko kelembagaan sebagai terlalu tinggi. OECD menegaskan bahwa kepuasan terhadap layanan publik dapat memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah, sedangkan World Bank menunjukkan bahwa kualitas tata kelola, termasuk pengendalian korupsi, merupakan prediktor kuat bagi pertumbuhan, inovasi, dan investasi. Dalam konteks investasi, World Bank juga menunjukkan bahwa dampak positif FDI lebih besar pada negara dengan kualitas institusi yang lebih baik, termasuk kontrol korupsi dan kualitas regulasi yang lebih kuat. Bagi Indonesia, relevansi tema ini sangat besar. Data OECD untuk Asia Tenggara menunjukkan tingkat

kepuasan publik terhadap layanan di Indonesia tergolong tinggi secara regional, tetapi KPK masih menilai integritas nasional berada pada kategori rentan, sementara BPS mencatat indeks perilaku antikorupsi justru menurun pada 2024. Di sisi lain, BKPM melaporkan realisasi investasi 2025 melampaui target dan menyerap jutaan tenaga kerja. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki momentum, tetapi keberlanjutan momentum tersebut sangat bergantung pada kemampuannya mengubah trust menjadi fondasi kelembagaan yang kokoh. Makalah ini menyimpulkan bahwa trust harus dipandang sebagai infrastruktur lunak pembangunan: ia menghubungkan layanan publik yang berkualitas, pemberantasan korupsi, dan kepercayaan investor ke dalam satu siklus kebijakan pembangunan nasional. ([OECD](#))

Kata kunci

Kepercayaan, modal pembangunan, layanan publik, korupsi, investasi, tata kelola, integritas, Indonesia.

Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi dan pembangunan, perhatian biasanya diarahkan pada variabel-variabel yang mudah diukur: pertumbuhan PDB, investasi, inflasi, kemiskinan, belanja pemerintah, atau produktivitas tenaga kerja. Namun di balik semua indikator itu, terdapat satu faktor yang sering bekerja secara diam-diam tetapi sangat menentukan, yakni kepercayaan. Kepercayaan membuat warga bersedia mematuhi aturan, membayar pajak, menggunakan layanan publik, menerima kebijakan yang sulit, dan tetap berada dalam kontrak sosial dengan negara. Kepercayaan juga membuat pelaku usaha bersedia berinvestasi, karena mereka yakin hak milik dilindungi, kontrak ditegakkan, regulasi cukup dapat diprediksi, dan keputusan administratif tidak semata ditentukan oleh suap atau koneksi politik. World Bank menegaskan bahwa institusi yang dipercaya

mengurangi ketidakpastian dalam transaksi ekonomi dan menjadi prasyarat bagi pertumbuhan, sementara OECD menempatkan trust sebagai hasil sekaligus penopang dari pemerintahan yang andal, responsif, adil, dan terbuka. ([World Bank](#))

Kepercayaan menjadi semakin penting justru ketika dunia memasuki masa ketidakpastian yang tinggi. Dalam situasi fiskal ketat, persaingan investasi global, dan tuntutan masyarakat atas layanan yang makin baik, negara tidak bisa hanya mengandalkan instrumen koersif atau prosedur formal. Negara memerlukan legitimasi. IMF menulis pada 2026 bahwa mobilisasi penerimaan domestik pada dasarnya adalah soal trust: ketika publik memandang pajak sebagai sesuatu yang korup atau sewenang-wenang, kepatuhan akan turun; ketika publik memandang pajak sebagai kontribusi bagi sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan perlindungan sosial, dukungan akan meningkat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa trust bukan isu moral semata, melainkan isu fiskal dan pembangunan. ([IMF](#))

Pada saat yang sama, trust juga berkaitan erat dengan mutu layanan publik. OECD mencatat bahwa layanan publik adalah titik sentuh utama antara warga dan negara, sehingga kepuasan terhadap layanan akan memperkuat trust pada pemerintah dan legitimasi institusi publik. Dalam laporan *Government at a Glance: Southeast Asia 2025*, OECD menunjukkan bahwa Indonesia mencatat tingkat kepuasan layanan publik sebesar 88 persen pada 2024, termasuk salah satu yang tinggi di kawasan, dan tingkat kepercayaan pada sistem peradilan sebesar 75 persen. Data ini penting, karena menunjukkan bahwa pengalaman sehari-hari warga terhadap layanan bukan urusan administratif kecil, melainkan fondasi pembentukan kepercayaan yang lebih luas terhadap negara. ([OECD](#))

Akan tetapi, trust tidak tumbuh di ruang hampa. Ia bisa terkikis oleh korupsi. World Bank menyebut bahwa tata kelola yang baik menentukan apakah sumber daya publik benar-benar sampai ke penerima manfaat, sementara korupsi merusak kualitas investasi publik, menghasilkan

Rudy C Tarumíngkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

infrastruktur yang buruk, dan melemahkan legitimasi negara. Dalam forum global antikorupsi 2025, World Bank menegaskan bahwa korupsi menggerus trust publik, menyebabkan penerimaan atas layanan dan infrastruktur yang substandar, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. OECD juga menunjukkan bahwa strategi antikorupsi yang efektif harus bersifat strategis dan menyeluruh, bukan sekadar respons ad hoc. ([World Bank](#))

Indonesia memberikan kasus yang menarik. Di satu sisi, performa investasi tetap kuat. BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi 2025 melampaui target tahunan, hilirisasi melonjak 43,3 persen, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,71 juta orang. Di sisi lain, KPK melaporkan Indeks Integritas Nasional hasil SPI 2024 baru mencapai 71,53 dan masih berada pada kategori rentan, sementara BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024 turun menjadi 3,85 dari 3,92 pada 2023. Gambaran ini menunjukkan adanya kontradiksi yang produktif untuk dianalisis: bagaimana investasi dapat terus masuk, tetapi modal trust kelembagaan belum sepenuhnya kokoh. ([BPKM](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan pokok: mengapa trust layak dipandang sebagai modal pembangunan, dan bagaimana relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi membentuk kualitas pembangunan nasional. Argumen yang diajukan adalah bahwa trust berfungsi sebagai "infrastruktur lunak" pembangunan. Bila layanan publik baik dan korupsi terkendali, trust menguat; bila trust menguat, biaya ekonomi dan politik pembangunan menurun; bila biaya itu menurun, maka investasi lebih mudah tumbuh dan kebijakan pembangunan lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, ketika korupsi merusak layanan publik, trust melemah, investasi menjadi lebih mahal atau lebih selektif, dan pembangunan kehilangan daya dukung sosialnya. ([OECD](#))

Kerangka konseptual: trust sebagai modal pembangunan

Rudy C Tarumingkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

Secara konseptual, trust dapat dipahami sebagai ekspektasi bahwa pihak lain—baik individu, perusahaan, maupun negara—akan bertindak secara cukup dapat diprediksi, jujur, dan tidak oportunistik. Dalam hubungan warga-negara, trust berarti keyakinan bahwa institusi publik bekerja tidak semata untuk elite atau jaringan patronase, tetapi untuk kepentingan umum. Dalam hubungan bisnis-negara, trust berarti keyakinan bahwa aturan dapat ditegakkan, izin dapat diperoleh tanpa rente ilegal, sengketa dapat diselesaikan, dan perubahan kebijakan tidak dilakukan secara arbitrer. World Bank menekankan bahwa institusi yang dipercaya mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran ekonomi, melindungi hak milik, dan memfasilitasi penegakan kontrak; semua itu merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. ([World Bank](#))

Dari sudut pandang pembangunan, trust dapat disejajarkan dengan modal sosial dan modal institusional. Ia bukan aset yang tampak seperti jalan raya atau pelabuhan, tetapi ia memengaruhi efektivitas aset-aset fisik tersebut. Sebuah rumah sakit modern tidak akan menghasilkan manfaat optimal jika warga tidak percaya pada sistem rujukan, tidak percaya pada integritas pengadaan obat, atau yakin bahwa layanan hanya cepat bagi mereka yang membayar lebih. Sebuah sistem perizinan digital tidak otomatis meningkatkan investasi jika pelaku usaha masih menganggap hasil akhirnya ditentukan oleh kedekatan personal. Jadi, trust bekerja sebagai penghubung antara desain kelembagaan dan perilaku aktual masyarakat. ([OECD](#))

OECD memberi kerangka yang berguna untuk memahami trust dalam institusi publik. Menurut OECD, trust dipengaruhi oleh persepsi warga mengenai reliabilitas dan responsivitas pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan serta layanan, dan juga oleh nilai-nilai fairness, integrity, dan openness. OECD juga menunjukkan bahwa sense of political agency—perasaan bahwa seseorang punya suara dalam keputusan pemerintah—sangat berkaitan dengan trust. Mereka yang merasa memiliki suara dalam keputusan publik melaporkan tingkat trust pada pemerintah

Rudy C Tarumíngkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

nasional yang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang merasa tidak punya suara. Dengan demikian, trust bukan sekadar soal hasil kebijakan, tetapi juga soal pengalaman keadilan, partisipasi, dan penghormatan dalam relasi dengan negara. ([OECD](#))

Pandangan ini sejalan dengan literatur pembangunan yang lebih luas. World Bank menulis bahwa governance menentukan “rules of the game” yang memengaruhi pertumbuhan jangka panjang, inovasi, kewirausahaan, dan efektivitas layanan publik. Ketika ada transparansi anggaran, pemantauan kinerja, dan keterlibatan warga, sumber daya lebih mungkin sampai kepada penerima manfaat yang tepat. Sebaliknya, ketika governance lemah, tambahan belanja publik sering memiliki dampak yang terbatas. Di sinilah trust memperoleh makna yang sangat praktis: trust bukan hanya akibat dari tata kelola yang baik, tetapi juga kondisi yang membuat tata kelola yang baik dapat berfungsi secara berkelanjutan. ([World Bank](#))

Ada pula dimensi ekonomi mikro yang penting. Dalam dunia usaha, trust menurunkan biaya verifikasi, biaya negosiasi, dan biaya penegakan. Investor tidak hanya melihat tarif pajak atau upah buruh, tetapi juga melihat apakah aturan main cukup stabil dan dapat ditebak. World Bank dalam *Global Economic Prospects 2025* menunjukkan bahwa dampak FDI terhadap output cenderung lebih besar di negara dengan institusi yang lebih kuat, termasuk lingkungan bisnis yang sehat, kontrol korupsi, dan kualitas regulasi yang baik. Ini berarti kualitas kelembagaan bukan sekadar “pelengkap” investasi, melainkan pengali manfaat investasi. ([The World Bank Docs](#))

Karena itu, menyebut trust sebagai modal pembangunan bukanlah metafora berlebihan. Ia layak disejajarkan dengan modal fisik karena keberadaannya menentukan apakah infrastruktur akan dipelihara, dengan modal manusia karena ia memengaruhi kemauan warga untuk terlibat dalam sistem publik, dan dengan modal finansial karena ia memengaruhi

persepsi risiko investor dan pembiayaan negara. Negara yang kaya sumber daya tetapi miskin trust akan tetap menghadapi ekonomi biaya tinggi, pelayanan yang timpang, dan investasi yang rentan. Sebaliknya, negara yang membangun trust secara bertahap dapat mengubah kapasitas yang terbatas menjadi legitimasi yang kuat dan hasil pembangunan yang lebih tahan lama. ([World Bank](#))

Layanan publik sebagai pabrik kepercayaan sehari-hari

Jika trust dipandang sebagai modal pembangunan, maka layanan publik adalah salah satu pabrik utamanya. Warga kebanyakan tidak berinteraksi setiap hari dengan konsep abstrak seperti kebijakan makroekonomi atau strategi pembangunan nasional. Mereka berinteraksi dengan loket administrasi, puskesmas, rumah sakit, sekolah negeri, kantor pertanahan, sistem pengaduan, polisi lalu lintas, dan pengadilan. Di titik-titik itulah negara hadir atau gagal hadir. OECD menekankan bahwa layanan publik adalah titik sentuh yang membentuk pengalaman sehari-hari warga terhadap institusi; karena itu, kepuasan atas layanan dapat memperkuat trust terhadap pemerintah. ([OECD](#))

Makna ini dapat dipahami melalui sebuah ilustrasi sederhana. Seorang pelaku UMKM yang ingin mengurus NIB, izin usaha, sertifikasi produk, dan sambungan utilitas tidak memulai penilaiannya terhadap negara dari pidato politik atau dokumen perencanaan. Ia menilai negara dari kecepatan proses, kejelasan syarat, konsistensi petugas, serta ada atau tidaknya biaya tersembunyi. Jika pengalaman itu baik, trust tumbuh bukan sebagai slogan, melainkan sebagai hasil pengalaman. Jika pengalaman itu buruk, maka distrust tumbuh dan menyebar, bukan hanya terhadap satu kantor, tetapi terhadap sistem secara keseluruhan. Hal serupa terjadi pada warga yang mengurus BPJS, akta kelahiran, sertifikat tanah, atau layanan pendidikan. ([OECD](#))

Dalam konteks Indonesia, data OECD untuk Asia Tenggara memperlihatkan basis yang cukup menjanjikan. Tingkat kepuasan layanan publik Indonesia

pada 2024 tercatat 88 persen, sementara kepercayaan pada sistem peradilan mencapai 75 persen. OECD juga mencatat bahwa peningkatan kepuasan layanan di Indonesia sejak 2014 termasuk salah satu yang terbesar di kawasan. Data ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dapat benar-benar mengangkat persepsi publik. Namun, persepsi positif itu tetap perlu dipelihara dengan konsistensi kualitas, bukan hanya inovasi episodik. ([OECD](#))

Ombudsman RI memberi dimensi yang lebih konkret bagi pembahasan ini. Dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik 2025, Ombudsman menegaskan bahwa tujuan penilaian adalah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas maladministrasi melalui kompetensi pelaksana, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan pengaduan, dan kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman. Ombudsman juga menyatakan bahwa mayoritas opini hasil penilaian 2025 berada pada kategori kualitas tinggi. Namun, laporan yang sama tetap menunjukkan adanya daerah dan unit layanan dengan potensi maladministrasi, bahkan beberapa wilayah masih masuk kualitas rendah atau terendah. Artinya, trust belum dibangun di atas pengalaman yang merata. ([Ombudsman Indonesia](#))

Kondisi ini penting secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, trust publik tidak cukup dibangun oleh keberhasilan rata-rata; ia juga dipengaruhi oleh persebaran pengalaman. Bila sebagian warga merasakan layanan cepat, bersih, dan jelas, tetapi sebagian lain masih mengalami penundaan, pungutan liar, atau ketidakpastian, maka trust nasional akan tetap rapuh. Secara praktis, ketimpangan kualitas layanan melahirkan persepsi bahwa negara bekerja baik untuk sebagian wilayah atau kelompok, tetapi tidak bagi yang lain. Dalam jangka panjang, persepsi seperti ini menggerus legitimasi. ([Ombudsman Indonesia](#))

Layanan publik juga memiliki dampak ekonomi yang langsung. Ketika administrasi publik efisien, pelaku usaha menghemat waktu dan biaya.

Ketika data kependudukan akurat dan mudah dipakai, program sosial lebih tepat sasaran. Ketika sistem pengaduan responsif, konflik kecil tidak tumbuh menjadi ketidakpuasan besar. Ketika perizinan dan pengadaan berlangsung terbuka, kepercayaan investor meningkat. Dengan kata lain, kualitas layanan publik memperpendek jarak antara trust dan produktivitas. Ia membuat negara bukan hanya dipandang “baik”, tetapi juga “berguna”.

([OECD](#))

Karena itu, memperbaiki layanan publik semestinya tidak dipahami sebagai proyek birokrasi semata. Ia adalah strategi pembangunan. Negara yang serius membangun trust harus memperlakukan pengalaman warga sebagai data strategis. Setiap antrean yang terlalu panjang, setiap syarat yang membingungkan, setiap pengaduan yang diabaikan, dan setiap keputusan yang tidak transparan pada dasarnya adalah pengikis trust. Sebaliknya, setiap perbaikan kecil yang konsisten—ketepatan waktu, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kesetaraan perlakuan—adalah investasi jangka panjang bagi legitimasi pembangunan. ([OECD](#))

Korupsi sebagai perusak trust dan pemborosan pembangunan

Jika layanan publik adalah pabrik kepercayaan, maka korupsi adalah perusak utama dari pabrik itu. Korupsi bukan hanya tindakan ilegal yang merugikan kas negara; ia adalah mekanisme yang mengubah fungsi negara dari pelayan kepentingan umum menjadi arena pertukaran rente. Begitu warga percaya bahwa keputusan publik dapat dibeli, bahwa pengadaan dimenangkan bukan oleh yang terbaik tetapi yang terdekat, atau bahwa layanan dapat dipercepat melalui pembayaran tidak resmi, maka kepercayaan kepada prosedur akan runtuh. Dalam forum antikorupsi 2025, World Bank menegaskan bahwa korupsi merusak kepercayaan publik, melemahkan rule of law, dan membuat masyarakat menerima layanan serta infrastruktur yang substandar. ([World Bank](#))

Dari sudut ekonomi pembangunan, kerusakan ini berlapis. Pertama, korupsi menyebabkan pemborosan fiskal. Transparency International

mencatat bahwa menurut estimasi IMF, 10 sampai 20 persen investasi dapat hilang akibat korupsi. IMF sendiri dalam *Fiscal Monitor 2025* menegaskan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, rule of law yang lebih kuat, dan proses pengelolaan investasi publik yang lebih efektif akan membelanjakan anggaran secara lebih efisien. Artinya, bukan hanya jumlah belanja yang penting, tetapi mutu tata kelola di balik belanja itu. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))

Kedua, korupsi menurunkan kualitas hasil pembangunan. Proyek tetap dibangun, tetapi kualitasnya lebih rendah dari anggaran yang dibelanjakan. Jalan lebih cepat rusak, sekolah kurang layak, obat tidak tersedia, dan infrastruktur memerlukan perbaikan lebih dini. World Bank menekankan bahwa korupsi mendistorsi keputusan pengeluaran publik dan melemahkan kualitas investasi publik karena sistem kontrol kualitas dan keselamatan dapat dilewati. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya “mengambil sebagian uang”, melainkan juga mengurangi manfaat sosial dari setiap rupiah pembangunan. ([P3 Resource Center](https://www.p3resourcecenter.org))

Ketiga, korupsi mengubah perilaku warga. Ketika orang percaya bahwa uang pajak akan disalahgunakan atau dihaburkan melalui mismanagement, kemauan untuk patuh turun. IMF pada 2026 menyebut dengan sangat jelas bahwa ketika publik melihat pajak sebagai sesuatu yang arbitrer atau korup, kepatuhan akan melemah. IMF juga pernah menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi lebih rendah mampu mengumpulkan pajak lebih besar sebagai porsi PDB daripada negara dengan tingkat korupsi tinggi pada tingkat pembangunan yang sebanding. Dengan demikian, korupsi merusak trust, dan kerusakan trust lalu mengurangi kapasitas fiskal negara, yang pada gilirannya kembali memperburuk layanan publik. ([IMF](https://www.imf.org))

Keempat, korupsi memperbesar ketimpangan akses. Dalam sistem yang korup, mereka yang punya uang, koneksi, atau posisi sosial lebih baik dapat memperoleh percepatan, kemudahan, bahkan perlindungan.

Sementara itu, warga biasa harus menunggu lebih lama, membayar lebih mahal, atau menerima layanan yang buruk. Inilah sebabnya korupsi tidak hanya merupakan persoalan efisiensi, tetapi juga persoalan keadilan. Trust publik sangat sensitif pada rasa keadilan. Ketika warga melihat ada hukum untuk yang lemah dan ada jalan belakang untuk yang kuat, maka trust pada negara melemah lebih cepat daripada yang dapat dipulihkan oleh sekadar kampanye komunikasi. ([PFM](#))

OECD karena itu menekankan pentingnya pendekatan strategis terhadap antikorupsi. Dalam *Government at a Glance 2025*, OECD menyatakan bahwa strategi antikorupsi yang baik harus menetapkan tantangan utama, prioritas, langkah yang dapat ditindaklanjuti, tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi yang kuat. OECD juga menunjukkan bahwa 63 persen negara OECD telah memiliki kerangka strategis whole-of-government untuk memperkuat integritas dan antikorupsi, dan strategi yang efektif tidak hanya menyasar birokrasi, tetapi juga risiko korupsi di sektor swasta, BUMN, dan kemitraan publik-swasta. Ini penting, karena korupsi modern sering bersifat lintas-sektor, bukan semata-mata perilaku individual pegawai negeri. ([OECD](#))

Dalam konteks Indonesia, indikator integritas masih memberi sinyal campuran. KPK melaporkan bahwa SPI 2024 menghasilkan skor 71,53 dan masih berada dalam kategori rentan. BPS pada 2024 juga mencatat IPAK sebesar 3,85, turun dari 3,92 pada 2023. Sementara itu, Transparency International melaporkan bahwa skor CPI Indonesia untuk 2025 turun menjadi 34 dan peringkatnya menjadi 109 dari 182 negara. Walau indikator-indikator ini mengukur aspek yang berbeda, semuanya mengarah pada satu pesan: agenda pembangunan Indonesia masih dibayangi tantangan integritas dan trust kelembagaan yang belum selesai. ([KPK](#))

Secara naratif, gambaran ini dapat dijelaskan begini. Bayangkan dua investor datang ke dua negara dengan potensi pasar yang mirip. Di negara pertama, izin mungkin memerlukan waktu, tetapi prosedurnya jelas,

pengadilan relatif dipercaya, dan pungutan di luar sistem jarang. Di negara kedua, izin bisa lebih cepat secara formal, tetapi keputusan sebenarnya bergantung pada jaringan informal, pembayaran tambahan, dan ketidakpastian penegakan kontrak. Investor yang rasional akan membaca perbedaan ini sebagai perbedaan trust institusional. Di sinilah korupsi tidak hanya menjadi masalah etika, tetapi juga menjadi *risk premium* ekonomi.

(PFM)

Investasi, kualitas institusi, dan kepercayaan pelaku usaha

Investasi tidak tumbuh hanya karena tersedia insentif pajak atau karena pasar domestik besar. Investasi tumbuh ketika pelaku usaha percaya bahwa proyek mereka dapat berjalan dengan risiko yang dapat dikelola. Karena itu, iklim investasi bukan hanya urusan promosi, tetapi urusan institusi. World Bank dalam *Global Economic Prospects 2025* menunjukkan bahwa FDI memberikan dampak output yang lebih besar di negara-negara dengan institusi yang lebih kuat, terutama yang memiliki lingkungan bisnis sehat, kontrol korupsi, kualitas regulasi yang baik, keterbukaan perdagangan lebih tinggi, human capital lebih baik, dan tingkat informality lebih rendah. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kualitas institusi memperbesar “return” pembangunan dari investasi yang masuk.

(The World Bank Docs)

Dalam bahasa yang lebih sederhana, investasi memang bisa datang ke negara dengan kelembagaan lemah bila ada sumber daya alam besar, pasar luas, atau peluang rente yang tinggi. Tetapi manfaat investasinya bagi pembangunan belum tentu optimal. Tanpa institusi yang baik, investasi dapat terkonsentrasi, rentan konflik, minim transfer teknologi, dan mudah bocor ke ekonomi rente. Sebaliknya, di negara dengan trust institusional yang lebih kuat, investasi lebih mungkin berubah menjadi perluasan lapangan kerja formal, kenaikan produktivitas, dan penguatan basis pajak. Karena itu, isu trust sangat relevan bukan hanya untuk

Rudy C Tarumingkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

"menarik" investasi, tetapi untuk "mengolah" investasi menjadi pembangunan. ([The World Bank Docs](#))

World Bank juga menegaskan secara umum bahwa governance menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan sektor swasta dan penciptaan kerja. Perusahaan berinvestasi dan berekspansi ketika hak milik aman, kebijakan dapat diprediksi, dan aturan ditegakkan secara adil. Ini adalah bahasa lain untuk menyebut bahwa trust institusional menurunkan ketidakpastian dan menambah horizon jangka panjang pelaku usaha. Investor tidak memerlukan negara yang sempurna, tetapi mereka memerlukan negara yang cukup dapat dipercaya. ([World Bank](#))

Dalam konteks Indonesia, kekuatan investasi masih terlihat nyata. BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi 2025 melampaui target tahunan dan menyerap 2,71 juta tenaga kerja, sementara realisasi hingga September 2025 telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan Rp1.905,6 triliun. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi. Namun justru karena investasi kuat, tantangan berikutnya menjadi lebih penting: bagaimana memastikan bahwa arus investasi ini tidak dibatasi oleh kelemahan trust institusional, baik di pusat maupun daerah. ([BPKM](#))

Poin ini sangat penting untuk dibedakan. Ada perbedaan antara investasi yang masuk "meskipun" kelembagaan belum ideal, dan investasi yang berkembang "karena" kelembagaan dipercaya. Yang pertama sering rapuh dan selektif; yang kedua cenderung lebih dalam dan lebih berjangka panjang. Bila investor masih harus memperhitungkan biaya informal, ketidakpastian sengketa, atau kualitas pelayanan publik yang timpang antarwilayah, maka sebagian investasi akan tetap datang, tetapi sebagian lain akan menunggu, mengurangi skala, atau meminta kompensasi insentif yang lebih besar. Dalam jangka panjang, ini berarti negara membayar lebih mahal untuk menarik modal yang sama. ([The World Bank Docs](#))

Ada pula dimensi reputasi. Transparency International mencatat bahwa pada 2025 rata-rata CPI global turun menjadi 42 dan 122 dari 182 negara skornya di bawah 50. Dalam lingkungan global seperti ini, investor makin sensitif terhadap sinyal integritas dan tata kelola, terutama untuk proyek jangka panjang, pembiayaan infrastruktur, dan investasi yang terkait rantai pasok internasional. Ketika reputasi integritas suatu negara memburuk, maka investor yang berhati-hati akan menaikkan premi risiko atau menurunkan ekspektasi keuntungan bersih. Dengan demikian, trust publik domestik dan trust investor internasional saling berhubungan.

([Transparency.org](https://www.transparency.org))

Narasi pembangunan Indonesia karena itu tidak boleh berhenti pada angka realisasi investasi. Yang lebih mendasar ialah apakah investasi tersebut tumbuh di atas fondasi trust yang kuat. Bila layanan publik membaik, korupsi ditekan, dan integritas birokrasi meningkat, maka investasi akan lebih mudah menyebar ke wilayah, sektor, dan pelaku usaha yang lebih luas. Sebaliknya, bila trust tidak diperkuat, investasi bisa tetap tumbuh, tetapi manfaat sosial-ekonominya kurang merata dan kualitas pertumbuhannya lebih rendah. ([OECD](https://www.oecd.org))

Indonesia: membaca relasi trust, layanan publik, korupsi, dan investasi

Indonesia hari ini berada dalam posisi yang menarik. Di satu sisi, ada bukti kemajuan administratif dan investasi yang nyata. OECD menunjukkan kepuasan layanan publik Indonesia tinggi secara regional. Ombudsman menyatakan mayoritas hasil penilaian 2025 berada pada kategori kualitas tinggi. BKPM menunjukkan investasi tetap kuat dan target tahunan terlampaui. Ini berarti negara tidak sedang memulai dari titik nol. Ada modal kelembagaan yang telah tumbuh melalui digitalisasi layanan, reformasi administratif, dan perbaikan iklim usaha. ([OECD](https://www.oecd.org))

Di sisi lain, indikator integritas mengingatkan bahwa fondasi trust masih belum kokoh. SPI nasional yang masih rentan, turunnya IPAK, dan merosotnya skor CPI Indonesia menunjukkan bahwa persepsi dan

Rudy C Tarumíngkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

pengalaman korupsi belum dapat dianggap sebagai masalah yang sudah teratasi. Dengan kata lain, Indonesia sedang berada pada persimpangan: kemajuan layanan dan investasi membuka peluang pembentukan trust yang lebih kuat, tetapi kelemahan integritas dapat menjadi rem yang perlahan menggerus peluang itu. ([KPK](#))

Hal ini penting karena trust tidak dibangun oleh satu indikator tunggal. Warga dapat puas pada beberapa layanan, tetapi tetap skeptis terhadap keadilan sistem secara keseluruhan. Investor dapat masuk karena pasar besar dan prospek sektor tertentu, tetapi tetap menganggap risiko kelembagaan tinggi. Karena itu, pembangunan trust memerlukan konsistensi lintas bidang: pelayanan publik yang nyata membaik, penindakan dan pencegahan korupsi yang kredibel, pengelolaan anggaran yang terbuka, serta mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang dapat dipercaya. OECD menekankan bahwa trust tumbuh dari reliabilitas, responsivitas, fairness, integrity, dan openness; satu unsur yang tertinggal dapat melemahkan keseluruhan bangunan. ([OECD](#))

Ada pula persoalan ketimpangan wilayah dan institusi. Laporan Ombudsman 2025 memperlihatkan bahwa di antara pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, masih ada variasi besar dalam opini kualitas layanan, mulai dari kualitas tertinggi hingga kualitas rendah dan terendah, dengan beberapa wilayah masih memiliki maladministrasi atau potensi maladministrasi. Ini berarti kepercayaan terhadap negara di Indonesia kemungkinan juga bersifat tidak merata secara geografis. Warga di daerah yang sering berhadapan dengan layanan buruk akan membangun persepsi negara yang berbeda dari warga di daerah dengan layanan yang lebih konsisten. ([Ombudsman Indonesia](#))

Dari sudut pembangunan nasional, ketidakmerataan ini berbahaya bila diabaikan. Ia dapat menciptakan Indonesia dengan dua wajah: wajah pertama adalah Indonesia yang modern, digital, ramah investasi, dan cukup responsif; wajah kedua adalah Indonesia yang lambat, tidak pasti,

dan rentan rente administratif. Selama dua wajah ini hidup berdampingan, trust nasional akan selalu parsial. Dan selama trust bersifat parsial, pembangunan akan lebih mahal secara politik dan ekonomi. ([Ombudsman Indonesia](#))

Agenda kebijakan: membangun trust sebagai strategi pembangunan

Jika trust adalah modal pembangunan, maka pertanyaan kebijakan yang relevan bukan sekadar “bagaimana meningkatkan trust” secara abstrak, melainkan “reformasi apa yang membuat warga dan investor memiliki alasan rasional untuk percaya.” Jawaban atas pertanyaan ini menuntut pendekatan yang konkret.

Pertama, kualitas layanan publik harus diperlakukan sebagai strategi pembangunan inti, bukan fungsi administratif pelengkap. Fokusnya bukan hanya digitalisasi, melainkan reliabilitas hasil: waktu layanan yang pasti, biaya yang transparan, prosedur yang sederhana, dan penyelesaian pengaduan yang benar-benar berjalan. OECD menekankan bahwa kepuasan dengan layanan memperkuat trust pada pemerintah, sehingga setiap reformasi layanan pada dasarnya juga merupakan reformasi legitimasi negara. ([OECD](#))

Kedua, antikorupsi harus diletakkan dalam kerangka strategis whole-of-government. OECD menegaskan bahwa strategi yang baik memerlukan prioritas yang jelas, pemantauan, evaluasi, dan cakupan yang menjangkau risiko di pengadaan, pengendalian internal, manajemen risiko, BUMN, dan kemitraan publik-swasta. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan penindakan kasus; ia juga memerlukan arsitektur pencegahan yang membuat perilaku koruptif lebih sulit, lebih mahal, dan lebih mudah terdeteksi. ([OECD](#))

Ketiga, pemerintah perlu menghubungkan reformasi integritas dengan efisiensi investasi publik dan daya tarik investasi swasta. IMF menunjukkan bahwa negara dengan korupsi lebih rendah dan rule of law lebih kuat

membelanjakan investasi publik dengan lebih efisien, sementara World Bank menunjukkan bahwa dampak FDI lebih besar di negara dengan kualitas institusi lebih baik. Artinya, reformasi integritas bukan biaya tambahan bagi pembangunan, melainkan syarat agar setiap rupiah belanja dan setiap dolar investasi memberi hasil yang lebih besar. ([IMF eLibrary](#))

Keempat, penguatan trust harus memasukkan dimensi partisipasi dan voice. OECD menunjukkan bahwa rasa memiliki suara dalam keputusan publik sangat berkaitan dengan trust pada pemerintah. Karena itu, reformasi layanan dan pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak bersifat sepenuhnya top-down. Musyawarah yang nyata, konsultasi publik yang bermakna, akses informasi yang baik, dan mekanisme umpan balik yang ditindaklanjuti akan memperkuat keyakinan warga bahwa negara tidak sekadar mengatur mereka, tetapi juga mendengar mereka. ([OECD](#))

Kelima, Indonesia perlu membangun reputasi integritas yang konsisten di tingkat pusat dan daerah. Investor tidak mengalami "Indonesia" secara abstrak; mereka mengalami kantor tertentu, pemerintah daerah tertentu, pengadilan tertentu, dan infrastruktur layanan tertentu. Karena itu, perbaikan trust nasional bergantung pada kemampuan mengurangi variasi kualitas pelayanan dan integritas lintas wilayah. Di sinilah data Ombudsman, SPI KPK, dan indikator pelayanan harus dipakai bukan sekadar untuk publikasi, tetapi untuk manajemen kinerja pembangunan. ([Ombudsman Indonesia](#))

Keenam, trust harus dipahami sebagai aset fiskal. IMF menegaskan bahwa ketika warga melihat pajak sebagai kontribusi bagi kesejahteraan bersama, dukungan meningkat; ketika pajak dipandang korup atau arbitrer, kepatuhan turun. Ini berarti kebijakan fiskal yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan fairness, akuntabilitas, dan komunikasi. Negara perlu menunjukkan hubungan yang lebih kasatmata antara penerimaan publik dan manfaat publik. Semakin jelas hubungan itu, semakin kuat trust dan tax morale. ([IMF](#))

Penutup

Kepercayaan bukan unsur pinggiran dalam pembangunan. Ia adalah salah satu fondasi yang menentukan apakah anggaran menjadi layanan, apakah layanan menjadi legitimasi, apakah legitimasi menjadi kepatuhan, dan apakah kepatuhan menjadi ruang bagi investasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanpa trust, negara harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang sama; dengan trust, banyak kebijakan dapat bekerja lebih efektif karena warga dan pelaku usaha melihat negara sebagai mitra yang cukup dapat dipercaya. ([World Bank](#))

Makalah ini menunjukkan bahwa relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi bukanlah tiga isu yang berdiri sendiri. Ketiganya membentuk satu rangkaian sebab-akibat. Layanan publik yang baik memperkuat trust. Korupsi merusak trust sekaligus menurunkan mutu belanja dan layanan. Trust yang kuat menurunkan biaya transaksi dan memperbaiki iklim investasi. Sebaliknya, trust yang lemah membuat investasi menjadi lebih mahal, lebih hati-hati, atau kurang produktif bagi pembangunan. OECD, World Bank, IMF, KPK, BPS, Ombudsman, dan BKPM semuanya—dengan bahasa dan indikator yang berbeda—mengarah pada kesimpulan yang sama: kualitas institusi menentukan kualitas pembangunan. ([OECD](#))

Bagi Indonesia, pelajaran terpentingnya adalah ini: pembangunan yang hanya mengejar angka investasi tanpa memperkuat trust akan menghasilkan fondasi yang rapuh. Sebaliknya, pembangunan yang mengaitkan pelayanan publik yang andal, integritas yang tegas, dan kepastian berusaha yang adil akan melahirkan pertumbuhan yang lebih tahan lama. Trust, dengan demikian, bukan sekadar sentimen psikologis masyarakat. Ia adalah infrastruktur lunak pembangunan nasional—sesuatu yang tidak selalu tampak, tetapi menentukan apakah seluruh mesin pembangunan bekerja dengan mulus atau justru tersendat oleh kecurigaan, rente, dan ketidakpastian. ([OECD](#))

Glosarium

Trust / kepercayaan: keyakinan warga atau pelaku usaha bahwa institusi publik akan bertindak secara dapat diprediksi, adil, dan konsisten dengan kepentingan umum. ([World Bank](#))

Layanan publik: layanan yang disediakan negara kepada warga, seperti administrasi, kesehatan, pendidikan, peradilan, dan layanan perizinan, yang menjadi titik sentuh utama antara warga dan pemerintah. ([OECD](#))

Korupsi: penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merusak kualitas belanja publik, pelayanan, dan legitimasi negara. ([World Bank](#))

Integritas publik: kondisi ketika lembaga dan aparatur menjalankan kewenangannya secara jujur, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan serta penyalahgunaan wewenang. ([OECD](#))

Maladministrasi: penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti penundaan berlarut, prosedur yang tidak patut, atau penyalahgunaan kewenangan administratif. ([Ombudsman Indonesia](#))

FDI (Foreign Direct Investment): penanaman modal langsung dari investor asing ke dalam kegiatan usaha di suatu negara, yang dampaknya sangat dipengaruhi kualitas institusi penerima. ([The World Bank Docs](#))

Iklim investasi: keseluruhan kondisi yang memengaruhi keputusan investasi, termasuk kualitas regulasi, kepastian hukum, pengendalian korupsi, dan mutu layanan publik. ([World Bank](#))

Rule of law: keadaan ketika hukum berlaku jelas, konsisten, dan adil bagi semua, termasuk dalam kontrak, hak milik, pengadaan, dan pengelolaan keuangan publik. ([PFM](#))

SPI (Survei Penilaian Integritas): instrumen KPK untuk mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. ([KPK](#))

IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi): indikator BPS yang mengukur tingkat permisivitas atau perilaku masyarakat terhadap praktik antikorupsi pada skala 0 sampai 5. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Daftar pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024*. BPS. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025). *Data realisasi investasi Triwulan IV tahun 2025*. BKPM. ([Data BKPM](#))

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2026, 15 Januari). *Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen*. BKPM. ([BPKM](#))

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025, 17 Oktober). *Q3 2025 investment realization reaches IDR 491.4 trillion*. BKPM. ([BPKM](#))

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 22 Januari). *KPK rilis hasil SPI 2024, skor indeks meningkat namun masih di kategori rentan*. KPK. ([KPK](#))

OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. OECD Publishing. ([OECD](#))

OECD. (2025). *Government at a Glance: Southeast Asia 2025*. OECD Publishing. ([OECD](#))

Ombudsman Republik Indonesia. (2026). *Penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025*. Ombudsman RI. ([Ombudsman Indonesia](#))

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025*. Transparency International. ([Transparency.org](#))

Transparency International. (2024). *Integrity pacts: A blueprint for safeguarding public investments for sustainable development*. Transparency International. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))

World Bank. (2025). *Global Economic Prospects, June 2025*. World Bank. ([The World Bank Docs](#))

World Bank. (2025). *Worldwide Governance Indicators: 2025 methodology revision*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *World Development Report 2025: Standards for Development*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2024). *What drives citizens' trust in state institutions?* World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *Partnerships for Anticorruption Global Forum 2025 report*. World Bank. ([World Bank](#))

IMF. (2026). *The art of taxation. Finance & Development*. ([IMF](#))

IMF. (2025). *Is public money safe without the rule of law?* IMF PFM Blog. ([PFM](#))

IMF. (2025). *Fiscal Monitor, October 2025: Spending smarter*. IMF. ([IMF eLibrary](#))

Bila Bapak berkenan, saya bisa lanjutkan ini menjadi versi yang lebih panjang lagi, mendekati 7.000 kata penuh, dengan tambahan subbagian khusus tentang kasus Indonesia, reformasi birokrasi, dan implikasi bagi investasi daerah.

Rudy C Tarumingkeng: Kepercayaan (trust) sebagai modal pembangunan: relasi antara layanan publik, korupsi, dan investasi

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 26 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c503e9-2dcc-83a0-8253-f7ed50bdd559>